

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sering kali dimaknai sebagai suatu proses untuk menciptakan peningkatan kualitas suatu daerah beserta masyarakat yang hidup di dalamnya.¹ Guna mempercepat proses pembangunan, salah satu yang harus diperhatikan adalah sarana infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur. Sebagaimana pembangunan infrastruktur merupakan penggerak utama untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah dan dapat mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.² Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan pada transportasi perkeretaapian.

Saat ini, dalam pembangunan transportasi perkeretaapian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa pemerintah lebih fokus untuk membangun jalur ganda kereta api. Tentu hal tersebut membuat pemerintah membutuhkan lahan yang cukup panjang dan luas. Oleh karena itu kemungkinan besar pemerintah akan mengambil lahan milik negara dari masyarakat yang hanya menumpang mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu tidak dapat dipungkiri praktik pembangunan ini berisiko akan menyisakan persoalan yang rumit secara sosial.³

¹ Alqhiffari Aqsa, 2015, *Atas Nama Pembangunan (Laporan Pengusurn Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015)*, Jakarta: LBH Jakarta, hlm.1

² *Ibid.*

³ Akhmad Fauzi, 2014, Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Mimbar*, Vol.30, No.01, hlm.43

Mengenai pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan pula dampak negatif yang lebih dirasakan masyarakat yang hidup di dalamnya, dimana bukan menjejahterakan melainkan menciptakan krisis berupa polarisasi sosial. Sistem perekonomian yang karut marut akan memposisikan sekelompok besar masyarakat di lapisan bawah yang menjadi dampaknya.⁴ Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat tersebut sejauh ini peneliti berasumsi bahwa mungkin pula akan menjadi akses dari adanya pembangunan yang memunculkan potensi konflik. Pembangunan yang memiliki banyaknya tujuan dalam pembebasan lahan yang tidak sedikit ini memungkinkan adanya pertentangan kepentingan dua belah pihak antara masyarakat yang terdampak dengan pemerintah atau perusahaan yang terlibat.

Pertentangan dalam kepentingan tersebut dalam jurnalnya Dicky Rahmawan yang mengutip Krisberg dapat dikatakan tidak bisa disamaratakan, bisa saja disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat teratasi, atau bahkan pertentangan tersebut disebabkan karena hal-hal sudah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh sebelah pihak.⁵ Dengan demikian di dalam penelitian tersebut pun dijelaskan mengenai pola eskalasi konflik yang diukur dari tingkat kekerasan (*degree of violence*) menurut Simon Fisher. Pola eskalasi konflik tersebut terdiri dari enam tingkatan pada dua kategori, antara lain kategori lisan (keresahan dan keluhan) dan kategori tindakan (laporan, tekanan, ancaman, perusakan, hingga terjadinya pembunuhan).⁶ Dalam menanggapi adanya pola eskalasi konflik tersebut, adanya strategi dari pemerintah atau perusahaan yang terlibat dalam

⁴ Wahyu Kustianingsih, 2017, Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo: Studi Kasus *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 102

⁵ Dicky Rachmawan, 2016, Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 2, hlm.195

⁶ *Ibid.*

pembebasan lahan untuk mengatasi konflik dalam kategori lisan atau laten, maka kecil kemungkinan munculnya konflik dalam kategori tindakan.

Terkhusus di Bogor, baik Kota maupun Kabupaten sendiri terdapat 2.000 bangunan liar, permanen, maupun semipermanen yang akan tergusur proyek *double track* atau jalur rel ganda kereta api (KA) Bogor-Sukabumi. Ribuan bangunan yang terencana digusur itu mulai dari stasiun Maseng, Cijeruk, Kabupaten Bogor hingga Kelurahan Paledang Bogor Tengah, Kota Bogor⁷. Dengan itu bangunan yang terdampak meliputi rumah, sekolah, madhrasah, pos polisi, posyandu, rumah makan, toko, dan jenis tempat usaha lainnya⁸. Adapun penjelasan Bapak Achyar Pasaribu sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat mengenai ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat yang terdampak sebagai berikut:

“Warga yang terdampak akan mendapat kompensasi dana kerohiman yang dibayarkan untuk bangunan berusia di atas 10 tahun”⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dalam surat kabar yang peneliti baca, besaran dana kerohiman akan dinilai terlebih dahulu oleh tim appraisal dari kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 pasal 8 ayat 2.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut ada empat kriteria terkait dana kerohiman, yaitu untuk uang pembongkaran, sewa rumah selama setahun, mobilisasi barang-barang, dan biaya kehilangan

⁷Haryudi, 2019, *2.000 Bangunan Terdampak Proyek Pembangunan Double track KA Bogor-Sukabumi*, Bogor: Sindonews.com (diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/jabar.sindonews.com/newsread/10553/1/2000-bangunan-terdampak-proyek-pembangunan-double-track-ka-bogorsukabumi-1568844578> pada 19 Maret 2020 pukul 18.03 WIB)

⁸Achmad Sudarno, 2019, *2000 Bangunan Kena Gusur Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi*, Bogor: Liputan6.com (diakses melalui <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4065540/2000-bangunan-kena-gusur-proyek-rel-ganda-bogor-sukabumi> pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.30 WIB)

⁹*Ibid.*

¹⁰Achmad Sudarno, 2019, *2000 Bangunan Kena Gusur Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi*, Bogor: Liputan6.com (diakses melalui <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4065540/2000-bangunan-kena-gusur-proyek-rel-ganda-bogor-sukabumi> pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.30 WIB)

pendapatan apabila rumahnya dijadikan tempat usaha.¹¹ Berdasarkan kegiatan verifikasi dan validasi pendataan warga terdampak pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi segmen Paledang – Maseng yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 terdapat total bidang atau bangunan yang terencana digusur dari Kelurahan Paledang hingga Cibalung yaitu sejumlah 2.177.¹² Pada kegiatan verifikasi dan validasi pendataan tersebut diketahui pula Kelurahan Empang merupakan wilayah yang paling banyak jumlah bidang atau bangunan yang terencana digusur atas pembebasan lahan pembangunan jalur ganda KA Bogor – Sukabumi ini dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Sekitar 802 jumlah bidang di Kelurahan Empang tersebut menjadi dampaknya.¹³ Peneliti melihat banyaknya jumlah bangunan tersebut ialah milik sekelompok besar masyarakat dari lapisan bawah.¹⁴ Kasus pembebasan lahan yang terjadi pada daerah tersebut menurut peneliti dapat dikatakan tidak semudah membalikan tangan. Tentu terdapat banyak pertentangan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sana.

Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu mengenai pembebasan lahan dampak yang akan terjadi kedepannya membuat peneliti melihat adanya konflik sosial. Dialektika konflik yang akan terjadi di pemukiman yang terdampak penggusuran ini di mulai dari konflik yang cenderung tertutup (*latent*), kemudian apabila hak-haknya tidak terpenuhi dan suara mereka tidak terdengar akan mencuat dan selanjutnya menjadi konflik *manifest*.¹⁵ Konflik *manifest* terjadi akibat tindakan agresif yang mendorong terjadinya tindakan

¹¹ *Ibid.*

¹²Malik, 2019, *Kompensasi Double track Sukabumi-Bogor Senilai Rp 56M*, Bogor: Radarsukabumi.com (diakses melalui <https://radarsukabumi.com/berita-utama/kompensasi-double-track-sukabumi-bogor-senilai-rp-56-m/> pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.19 WIB)

¹³ *Ibid.*

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Eko, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 13.00 WIB

¹⁵Dwi Setianingsih, 2012, *Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum*, Tesis : Universitas Indonesia, hlm.3

perlawanan yang didasari oleh pertimbangan moralitas melalui protes, perlawanan yang dinilai sebagai cara yang efektif, dan efisien dalam menuntut hak-hak mereka.

Melihat fenomena pengusuran tersebut menjadi alasan peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pola eskalasi konflik di pemukiman pinggir rel kereta api yakni pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu proyek jalur ganda PT KA Bogor-Sukabumi. Di mana peneliti melihat adanya benturan-benturan kepentingan yang berpeluang menimbulkan konflik diantara pemerintah dan PT KA sebagai penyelenggara pembangunan serta pemilik tanah dengan masyarakat yang telah bermukim sejak berpuluh tahun lamanya di atas lahan milik negara. Tidak dapat dipungkiri bahawa konflik berubah setiap saat melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahapan atau pola eskalasi konflik ini penting sekali diketahui untuk menganalisis berbagai permasalahan di masyarakat khususnya dalam pembangunan berkelanjutan penggerak utama perekonomian suatu daerah.

Sehingga penelitian ini sangat penting dikaji untuk melihat sejauh mana konflik yang dialami masyarakat pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor pada pembebasan lahan dalam pembangunan jalur ganda KA Bogor – Sukabumi berdasarkan pola eskalasi konflik. Teori yang tepat untuk menganalisis hasil penelitian ini pun ialah teori konflik menurut Simon Fisher.

1.2 Pemasalahan Penelitian

Setiap tahun penduduk Kota Bogor terus mengalami pertumbuhan, sehingga tidak heran dengan kepadatan penduduk yang kian semakin tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut tidak heran pula apabila terdapat banyaknya pemukiman di lahan-lahan yang bukan haknya.¹⁶ Seperti halnya pemukiman yang berada di pinggiran rel kereta api Bogor-Sukabumi. Salah satu pemukiman tersebut yaitu pemukiman Raden Saleh Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sehingga ketika adanya rencana penggusuran untuk proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi pada tahun 2018-2020 ratusan bangunan warga di pemukiman tersebut mengalami dampaknya. Berbagai alasan bagi masyarakat yang terdampak untuk mempertahankan bangunan yang mereka tempati.

Perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah bahkan PT KAI selaku penyelenggara tentu berpotensi memunculkan konflik. Konflik yang akan muncul tersebut berawal dari perasaan ketidakadilan yang dialami masyarakat.¹⁷ Perasaan ketidakadilan yang dialami masyarakat tersebut pun bermula pada perasaan takut akan pemberian uang kerohiman sebagai ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan. Pemukiman yang erat kaitannya dengan rasa aman dan amat dipengaruhi oleh frekuensi perjumpaan dengan lingkungan fisik dan sosial, sejarah, rasa kepemilikan, serta *belief* mengenai lingkungan tempat tinggal adalah sebuah nilai yang berharga dan tidak bisa tergantikan.

Penurunan tingkat kesejahteraan sosial – ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak penggusuran pun pasti terjadi.¹⁸ Hal ini terlihat dari adanya

¹⁶ Bappeda Kota Bogor, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor*, 2014, hlm.21(diakses melalui <http://bappeda.kotabogor.go.id> pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 15.00)

¹⁷ Pitri Nadiyahul Firdausi, 2018, Analisis Dampak Sosial Perencanaan Revitalisasi Pasar Wates Wetan Ranuyoso Lumajang, *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Vol.1, No.2, hlm.177

¹⁸ *Ibid*, hlm. 184

ganti rugi yang diberikan oleh pihak penyelenggara hanya sekedar transaksi ekonomi dan tidak memberi solusi sebagai jalan keluar mengenai pendapatan yang hilang bagi para pengusaha yang membuka usahanya di pemukiman tersebut. Kondisi sosial masyarakat yang semakin rumit dan berubahnya irama kehidupan pun terlihat ketika mereka memikirkan akan dibawa ke mana kehidupan ke depannya. Konflik yang cenderung tertutup ini pun terus dialami masyarakat yang terdampak seperti kesedihan, ketakutan, keresahan, dan kesetresan dari masa pra-penggusuran, proses penggusuran, hingga pasca- penggusuran.

Melihat dari fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis pola konflik laten penggusuran lahan pada pemukiman pinggiran rel yang terkena proyek *double track* KA Bogor-Sukabumi, pada studi kasus Pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik yang terjadi pada masyarakat pemukiman Raden Saleh atas pembebasan lahan proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi?
2. Bagaimana pola konflik laten diantara masyarakat yang terdampak dengan instansi pemerintah mewakili PT KAI pada kegiatan pembebasan lahan proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi di Raden Saleh Jalan Layungsari III?
3. Bagaimana pengelolaan konflik yang dilakukan oleh PT KAI pada kegiatan pembebasan lahan bagi pemukiman Raden Saleh sebagai akibat proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi pada masyarakat pemukiman Raden Saleh atas pembebasan lahan proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi
2. Untuk mendeskripsikan pola konflik laten diantara masyarakat yang terdampak dengan intansi pemerintah mewakili PT KAI pada kegiatan pembebasan lahan proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi di Raden Saleh Jalan Layungsari III
3. Untuk mendeskripsikan pengelolaan konflik yang dilakukan oleh PT KAI pada kegiatan pembebasan lahan bagi pemukiman Raden Saleh sebagai akibat proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Secara akademis hasil dari penelitian ini dimaksud untuk memberikan kontribusi pada kajian keilmuan sosiologi perkotaan. Peneliti dalam penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dinamika pembangunan yang terjadi di perkotaan. Permasalahan sosial yang terjadi di pemukiman tersebut akan menjadi contoh nyata pada pembelajaran sosiologi kelas 11 SMA mengenai permasalahan sosial dan konflik sosial.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran yang terjadi di pemukiman Raden Saleh Layungsari III Empang Kota Bogor kepada pemerintah daerah mengenai pembebasan lahan atas proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi. Pemerintah harus mengetahui

bagaimana kehidupan warga setelah mengetahui pemukimannya terencana kena penggusuran. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih memikirkan kembali bagaimana pola eskalasi konflik dan dampak sosial yang akan dialami oleh warga setelah tergusur. Pemerintah diharap mampu mempunyai cara atau strategi agar warga yang tergusur tidak sulit untuk berkehidupan nantinya. Pemerintah dapat memikirkan kembali kesiapan dari sarana dan fasilitas untuk warga yang tergusur ini.

1.4 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan penelitian sejenis berupa jurnal, tesis, disertasi, dan buku yang dapat membantu penulis dalam proses penelitian. Tinjauan penelitian sejenis ini menggunakan enam jurnal nasional, sepuluh jurnal internasional, empat tesis, satu disertasi, dan sepuluh buku. Berikut merupakan studi literatur tinjauan penelitian sejenis yang akan memaparkan hasil studinya pada masing-masing.

Berawal dari studi tentang pemukiman di perkotaan terdapat dalam buku yang ditulis oleh Nasrullah dan jurnal yang ditulis oleh Sulistya. Nasrullah menjelaskan bahwa pemukiman di perkotaan setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan jumlah penduduk, baik dari tingginya angka kelahiran hingga urbanisasi dari desa ke kota.¹⁹ Sedangkan Sulistya mengkaji pula mengenai bayangan tentang kemajuan dan gemerlapnya kota menjadi daya tarik terjadinya migrasi ke kota.²⁰ Dari waktu ke waktu, perkembangan kota begitu cepat, akibatnya timbul berbagai masalah, seperti degradasi lingkungan,

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA hlm.132

²⁰ Sulistya Wardaya, 2018, Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi, *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol.2, No.1, hlm.80

kesumpekan, kemacetan, krisis sosial, kerusuhan, kriminalitas merebak di mana-mana, terutama di kota-kota besar, metropolis dan megapolis.²¹

Aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi pemukiman di perkotaan meliputi tata ruang kota;²² berkembangnya fasilitas dan infrastruktur;²³ serta, problem penggusuran untuk kepentingan pembangunan kota.²⁴ Tujuan awal perencanaan tata ruang yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat serta menyamankan masyarakat ini beralih menimbulkan keresahan baru pada masyarakat yang terencana digusur dari pemukiman yang telah berpuluh-puluh tahun berdiri menempati wilayah tersebut secara turun-temurun.²⁵ Masih

²¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit*, hlm. 134

²² Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit.*, Sulisty Wardaya, *Loc.Cit.*, Akhmad Fauzi, 2014, Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Mimbar*, Vol.30, No.01, hlm. 42

²³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit.*, Wahyu Kustianingsih, 2017, Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.4, No.1, hlm. 91., Anthony Giddens, 2006, *Sociology (Fifth Edition)*, USA: Polity Press, hlm. 686., Rakhmat Hidayat, 2016, *Sosiologi Pendidikan EMILE DURKHEIM*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.88

²⁴ Mathew Desmond, 2012, Eviction and the Reproduction of Urban Poverty, *The American Journal of Sociology*, Vol.118, No.01, hlm. 88., Bulent Anil, 2011, Housing Uncertainty and Childhood Impatience, *Jurnal of Sociology : Urban Education*, Vol.45, No.5, hlm. 1169., Gretchen Purser, 2014, The Cricle of Dispossession: Evicting the Urban Poor in Baltimore, *Critical Sociology*, Vol.42, No.3, hlm. 393., Jean du Plessis, 2005, The Growing Problem of Forced Eviction, *Jurnal Enviroment & Urbanization*, Vol.17, No.1, hlm. 123., Susanne Alm, 2017, Isolating the effect of eviction on criminal convictions: Results from a Swedish study, *Acta Sociologica*, Vol.61, No.3, hlm. 263., Aaron Gottlieb, 2018, The Effect of Eviction on Maternal Criminal Justice Involvement, *SOCIUS: American Sociological Association*, Vol.4, No.1, hlm. 1., Rezaul Islam, 2015, Forced Eviction in Bangladesh: A Human Right Issue, *International Social Work*, Vol. 01, No. 01, hlm.1., Wawan Some, 2009, Renovation Not Relocation: The Work of Paguyuban Warga Strenkali (PWS) in Indonesia, *Environment & Urbanization*, Vo.21, No.2, hlm. 463., Eric Seymon, 2019, Building the Eviction Economy: Speculation, Precanity, and Eviction in Detroit, *Urban Affairs Review*, Vol.1, No.1, hlm.1., Dwi Setianingsih, 2012, Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum, *Tesis: Universitas Indonesia*, hlm.3., Wahyu Candra Alam, 2010, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya, *Tesis: Universitas Diponegoro*, hlm.63., Rovita Ayuningtyas, 2015, Implementasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, *Tesis: Universitas Sebelas Maret*, hlm.15., Alghifafari, 2015, *Atas Nama Pembangunan (Laporan Penggusurn Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015)*, Jakarta: LBH Jakarta, hlm.21., Andi Besse Tenri Adjeng, 2017, Penetapan Lokasi dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, *Tesis: Universitas Hasanudin*, hlm. 35

²⁵ Alghifafari Aqsa, *Op.Cit*, hlm. 21

banyak terdapat penggusuran yang disertai ganti rugi (uang kerohiman) itu tidak layak untuk diterima.²⁶

Dengan demikian penggusuran pemukiman di perkotaan melahirkan konflik baik pada pra-penggusuran maupun ketika pasca-penggusuran.²⁷ Pada pra-penggusuran sendiri konflik terjadi dalam bentuk keresahan dan keluhan atau biasa disebut dengan bentuk laten yang dialami masyarakat.²⁸ Sedangkan pada pasca-penggusuran konflik dapat berubah menjadi bentuk manifes (kekerasan) apabila hak-hak masyarakat yang terdampak tidak terpenuhi dan suara mereka tidak terdengar.²⁹

Adanya pola eskalasi konflik yang terjadi pada fenomena penggusuran ini terdiri dari konflik antara masyarakat dengan instansi pemerintah,³⁰ serta konflik antara masyarakat dengan pemegang proyek.³¹ Apabila hubungan antara masyarakat dengan instansi pemerintah dan pemegang proyek tidak buruk dan PT KAI dapat mengelola konflik dengan baik, maka konflik yang akan terjadi pada pra – penggusuran maupun pasca penggusuran adalah konflik dalam bentuk laten.³²

²⁶ *Ibid*, hlm.21

²⁷ George Ritzer, 2012, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , Bab 7, hlm. 450., Jeanne H. Ballantine, 2018, *Schools and Society A Sociological Aproach to Education*. London: SAGE Publications Ltd, hlm. 18., Dicky Rachmawan, 2016, Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 2, hlm. 193., Fitri Nadiyah Firdausi, 2018, Analisis Dampak Sosial Perencanaan Revitalisasi Pasar Wates Wetan, Ranuyoso, Lumajang, *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Vol. 1, No. 2, hlm. 173., Dwi Setianingsih, *Loc.Cit.*, Siti Aminah, 2015, Konflik & Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1, hlm. 59., Gretchen Purser, *Loc.Cit.*, Musdalifah, 2007, Konflik Agraria dalam Relasi antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat, *Disertasi: Universitas Hasanudin*, hlm. 6., Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 218., Henry Tischler, 2007, *Introduction to sociology (Ninth Edition)*, USA: Thomson Wadsworth, hlm. 80., Simon Fisher, 2001, *Mengelola Konflik (Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak)*, Jakarta: The British Council, hlm.4

²⁸ Dicky Rachmawan, *Loc.Cit*, hlm.196

²⁹ Dwi Setianingsih, *Loc.Cit.*, Gretchen Purser, *Loc.Cit.*, Simon Fisher, *Op.Cit*

³⁰ George Ritzer, *Op.Cit.*, Dicky Rachmawan, *Loc.Cit*

³¹ Dicky Rachmawan, *Loc.Cit.*, Wahyu Kustianingsih, *Loc.Cit*

³² Simon Fisher, *Op.Cit*

Adapun dampak sosial yang akan dialami oleh masyarakat yang terdampak pengusuran atas setiap proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, dampak sosial yang dialami masyarakat tersebut pun bersifat negatif dan positif. Dampak sosial yang bersifat negatif antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin buruk sehingga tidak dapat dipungkiri hal ini sebagai akses dari adanya pembangunan yang memunculkan potensi konflik.³³ Menurut Sudharto P. Hadi yang mengutarakan dampak-dampaknya diantara lain berupa (1) waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan untuk mencari pemukiman baru; (2)disrupsi (gangguan) keterikatan sosial (tetangga, keluarga, dan masyarakat); (3) disrupsi pola hubungan sosial karena harus berpindah ke tempat lain dan memulai lagi dengan ikatan sosial yang baru; (4) stress, psikologis, karena merasa “insecured” atau rasa tidak aman; (5) perubahan dalam akses ke tempat kerja, tempat perbelanjaan, reaksi, transportasi, dan lain-lain; (6) perubahan kondisi rumah; (7) merasa teraliniasi (terasing) di pemukiman baru; (8) kesulitan ekonomi (hilangnya pekerjaan pekerjaan utama, menurunnya pendapatan dan lain hal sebagainya).³⁴

Sehingga untuk meminimalisir dampak sosial negatif yang telah dijelaskan diatas, pemerintah dan masyarakat harus membentuk suatu interaksi yang menciptakan keadilan didalamnya.³⁵ Hal ini pun bukan hanya untuk meminimalisir dampak sosial negatif, namun mampu menjadi resolusi untuk konflik yang dialami oleh masyarakat yang terencana pengusuran dalam proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.³⁶ Adapun ringkasan peta penelitian sejenis yang dapat dilihat dalam skema sebagai berikut.

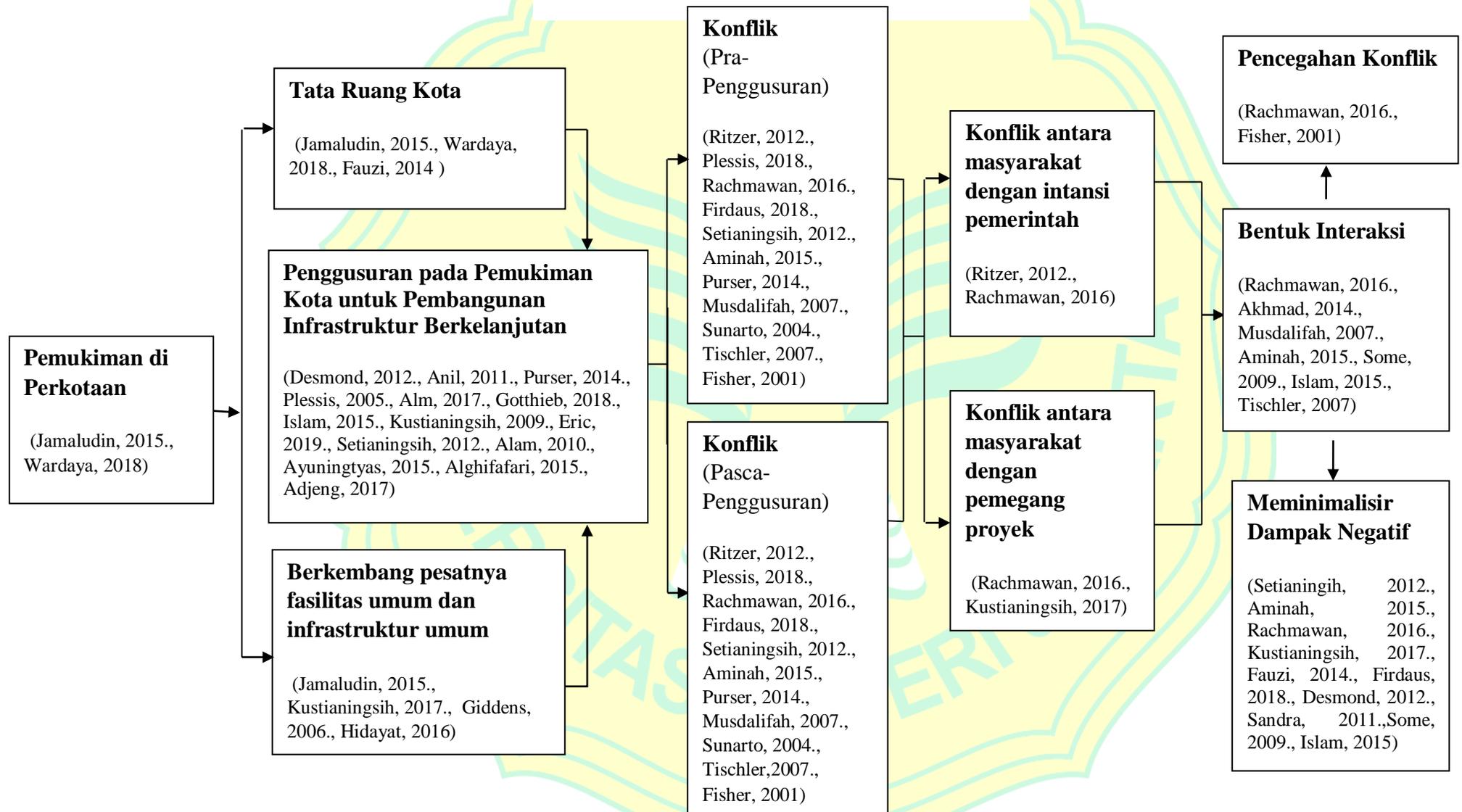
³³ Dwi Setianingsih, *Loc. Cit.*, hlm.3

³⁴ *Ibid*, hal.4

³⁵ Dicky Rachmawan, *Loc. Cit.*, Akhmad Fauzi, 2014, Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Mimbar*, Vol.30, No.01, hlm. 42., Musdalifah, *Loc. Cit.*, Siti Aminah, *Loc. Cit.*, Wawan Some, *Loc. Cit.*, Rezaul Islam, *Loc. Cit.*, Henry Tischler, *Op. Cit*

³⁶ Dicky Rachmawan, *Loc. Cit.*, Simon Fisher, *Op. Cit*

Skema I.1 Tinjauan Penelitian Sejenis



(Sumber : Analisis Penulis, 2020)

Berdasarkan skema I.1 mengenai tinjauan penelitian sejenis tersebut, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai posisi penelitian skripsi penulis. Penulis akan melakukan penelitian untuk menjelaskan mengenai pola konflik laten pada masyarakat yang terdampak dalam pembebasan lahan bagi pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III sebagai akibat proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi di kota Bogor. Kemudian menjelaskan pula mengenai respon masyarakat terhadap pemerintah dan PT KA pada kegiatan pembebasan lahan proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi di pemukiman Raden Saleh, Layungsari III Empang Kota Bogor sebagai bentuk konflik yang sedang terjadi di daerah tersebut. Sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan pengelolaan konflik yang dilakukan oleh pihak PT KAI dalam penggusuran pemukiman Raden Saleh Layungsari III Empang, Kota Bogor.

Oleh sebab itu, untuk mempermudah menjelaskan penelitian yang akan penulis lakukan, analisis teori yang penulis gunakan yaitu teori konflik menurut Simon Fisher, yang pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan dampak sosial apa yang akan dialami oleh masyarakat yang terdampak pembebasan lahan proyek jalur ganda PT KA Bogor-Sukabumi. Di mana hal ini berbeda dengan studi penggusuran terdahulu yang hanya membahas mengenai konflik dalam lingkup umum, sedangkan penelitian kali ini akan membahas konflik berdasarkan tahapan konflik dan bagaimana tindakan dalam mengelola konflik untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pembangunan Transportasi Publik

Patut kita ketahui terlebih dahulu pentingnya transportasi publik bagi kehidupan bermasyarakat terlihat dari beberapa manfaat transportasi publik itu sendiri, yakni adanya manfaat ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan Ikhsantono, transportasi publik adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga menimbulkan adanya transaksi.³⁷ Selain manfaat ekonomi tersebut, ada beberapa manfaat sosial transportasi publik pula yang harus diketahui, yakni menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya; pelayanan untuk perseorangan atau kelompok; pertukaran atau penyampaian informasi; perjalanan untuk bersantai; memendekkan jarak; serta memencarkan penduduk.³⁸

Di satu sisi, setiap merencanakan suatu pembangunan kota atau wilayah ditujukan untuk menyejahterakan dan menyamankan masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan di kota.³⁹ Oleh karena itu dalam proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) peran serta masyarakat dengan kearifan lokalnya perlu diberikan *tools* dan mekanisme yang jelas agar berinteraksi dalam penyelenggaraan pembangunan yang tepat. Hal ini karena setiap langkah dalam suatu pembangunan memerlukan rencana yang matang agar menguntungkan dari segala aspek.

Sudah saatnya kota tidak sekedar sebagai *economic and business battleground* atau sebagai ajang bagi *every war* masyarakat yang ada di dalamnya, tetapi memperlakukannya juga sebagai wadah dan wahana

³⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit*, hlm.269

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm.132

perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia dalam pembangunan. Beragam peran dari perencanaan pembangunan itu sendiri, yaitu: (1) menghasilkan kondisi pencapaian kualitas kehidupan dan penghidupan yang lebih baik; (2) memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat; (3) memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan.⁴⁰ Dengan demikian secara umum, tujuan pembangunan adalah (1) menggapai visi masa depan dari sebuah wilayah atau lokasi berdasarkan kondisi saat ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat. (2) menerjemahkan visi menjadi seperangkat kebijakan, prioritas, program, dan alokasi lahan dengan memanfaatkan sumber daya sektor publik untuk mewujudkannya. (3) menciptakan kerangka kerja investasi swasta yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial dari suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat. Pada satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya infrastruktur transportasi, suatu daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.⁴¹ Namun tidak dapat dipungkiri di satu sisi lainnya, akibat tingginya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tersebut permasalahan transportasi pun muncul.

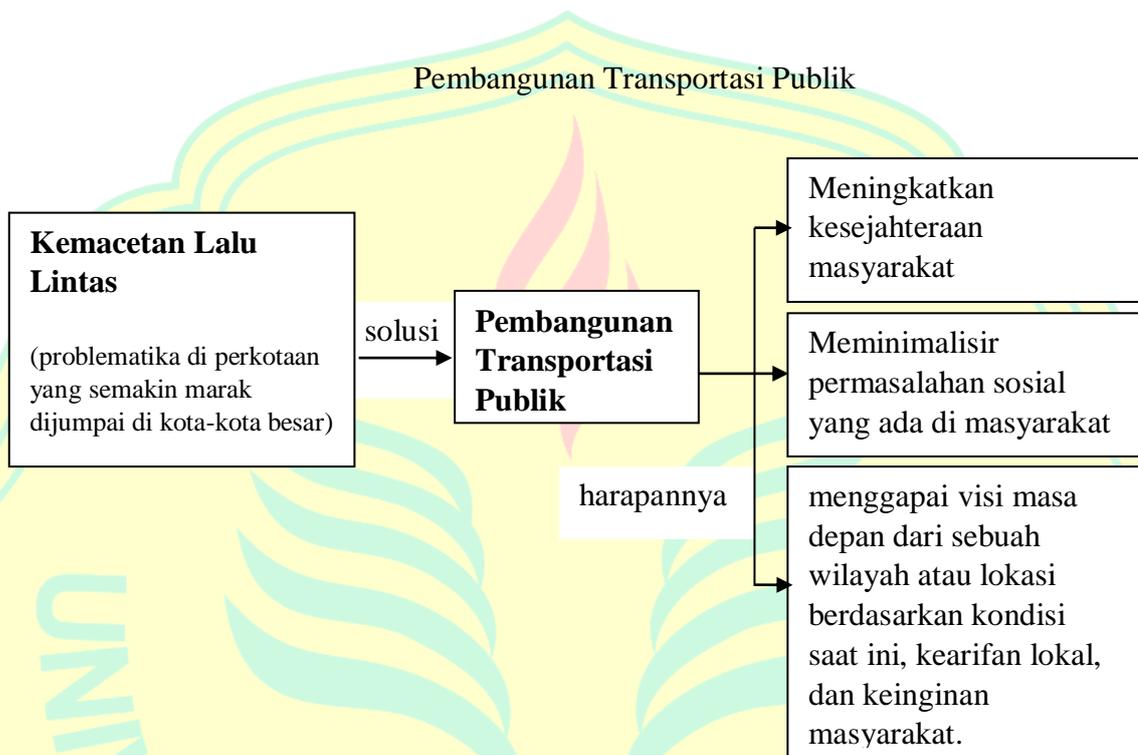
Permasalahan transportasi tersebut yang saat ini kian meningkat yaitu mengenai kemacetan lalu lintas. Berkaitan dengan hal tersebut membuat pemerintah setiap tahunnya pasti menyelenggarakan pembangunan dalam penambahan jalur transportasi sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan upaya untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi yang semakin meningkat. Salah satu pembangunan dalam penambahan jalur transportasi yang dapat diandalkan dan dianggap efektif saat ini yaitu

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 265

pembangunan jalur ganda kereta api. Berikut skema mengenai pembangunan transportasi publik dari analisis penulis:

Skema I.2



(Sumber: Analisis Penulis, 2020)

1.5.2 Pemukiman Pinggir Rel Kereta Api di Perkotaan

Pemukiman di perkotaan setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan jumlah penduduk, baik dari tingginya angka kelahiran dan urbanisasi dari desa ke kota. Daya tarik kota yang mendorong terjadinya urbanisasi ini disebut sebagai faktor penarik (*pull factor*).⁴² Pemicunya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga sosial budaya dan pelayanan kehidupan kota. Bayangan tentang kemajuan dan gemerlapnya kota menjadi daya tarik terjadinya migrasi ke kota. Di Indonesia diperkirakan perpindahan penduduk yang disebabkan oleh pekerjaan hanya sekitar 40%, selebihnya

⁴² *Ibid*, hlm. 189

karena alasan non ekonomi dan nonlapangan kerja, seperti ikut keluarga, mendapatkan pendidikan lebih tinggi, dan tanpa tujuan yang jelas.⁴³

Alasan lain penduduk desa pindah ke kota ialah karena struktur pemilikan tanah yang tidak seimbang dan adanya konsentrasi usaha ekonomi nonpertanian pada petani pemilik tanah yang luas, sering mempersempit usaha dan lapangan kerja di pedesaan.⁴⁴ Selain itu, tidak adanya rotasi penanaman dan pemanenan karena kegiatan tersebut dilakukan secara serempak, menyebabkan ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja pula. Masuk atau keluar dari suatu populasi memerlukan tiga unsur sistem kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.⁴⁵ Orang dapat masuk ke dalam suatu populasi melalui kelahiran yang lazim disebut dengan istilah fertilitas. Keluarnya penduduk mungkin terjadi karena kematian yang disebut mortalitas. Kemudian, apabila unit analisisnya sempit antar daerah yang berdekatan, perpindahan itu disebut migrasi masuk. Sedangkan keluarga penduduk karena pindah dengan skala kecil dan sempit disebut migrasi keluar.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemukiman yang ada saat ini seperti lokasi yang akan diteliti dalam penelitian yakni di Layungsari III Kota Bogor terbangun karena kemungkinan besar adanya peningkatan fertilitas setiap tahunnya dan urbanisasi penduduk desa ke kota. Berikut skema faktor penyebab pemukiman pinggir rel kereta api di perkotaan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk:

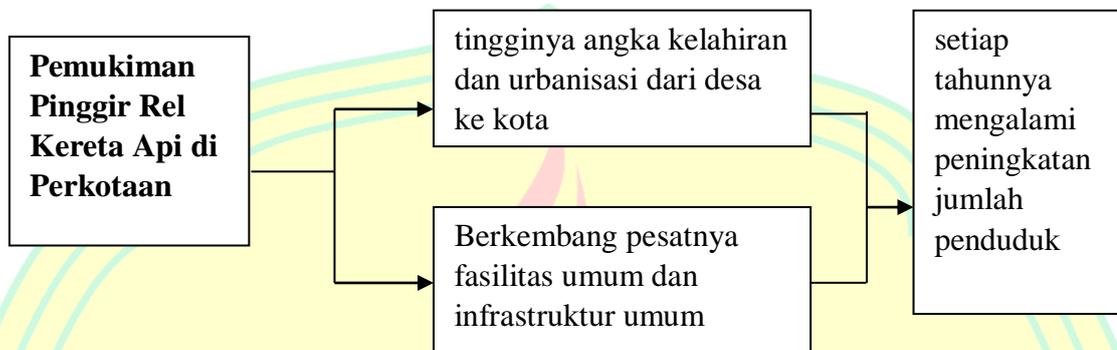
⁴³ *Ibid*, hlm.190

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.192

Skema I.3

Pemukiman Pinggir Rel Kereta Api di Perkotaan



(Sumber: Jamaludin, 2015)

1.5.3 Penggusuran Pemukiman di Lahan Milik Negara

Sejak dahulu pembangunan sudah menjadi alasan terciptanya penggusuran paksa di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang.⁴⁶ Mengutip Joel Audefroy (1994) dalam *Eviction Trends Worldwide and the Role of Local Authorities the Right to Housing* yang menyatakan bahwa alasan utama penggusuran di Indonesia hingga tahun 1991 disebabkan oleh pembangunan dan penataan kota.⁴⁷ Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kota dan masyarakat yang hidup di dalamnya itu pun ternyata belum tentu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan yang berlangsung di DKI Jakarta, Ibukota Indonesia, bahkan hampir pembangunan kota-kota besar di Indonesia cenderung menjadikan warga sebagai korban penggusuran paksa yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar mereka. Padahal Indonesia telah

⁴⁶ Alqhiffari Aqsa, *Op.Cit*, hlm.1

⁴⁷ *Ibid.*

mensertifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sejak tahun 2005. Pasal 11 konvenan tersebut menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perumahan yang layak. Lebih lanjut, pendapat umum *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)* Nomor 7 Tahun 1997, menyatakan bahwa penggusuran dapat berdampak pada hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya, keluarga, dan rumah tangga, serta hak atas jaminan hak milik. Bahkan Komisi HAM PBB mengategorikan penggusuran paksa sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia melalui resolusi nomor 2008/24.⁴⁸

Pada pendapat umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang penggusuran paksa yang mengatur bahwa penggusuran yang memenuhi standar HAM adalah adanya musyawarah yang tulus antara pihak yang akan melakukan penggusuran dan warga terdampak.⁴⁹ Musyawarah yang tulus, tentunya juga wajib disertai dengan pemberian informasi yang cukup bagi warga terdampak mengenai pengalihgunaan lahan yang sedang mereka huni.⁵⁰ Namun ironisnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis buku yang berjudul “ATAS NAMA PEMBANGUNAN (Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015)” oleh Alghiffari Aqsa dan Yunita Purnama ini hampir seluruh kasus penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak melalui prosedur musyawarah sebelum melaksanakan penggusuran.

Dari total 113 kasus penggusuran DKI Jakarta sepanjang tahun 2015, sebanyak 18 kasus diputuskan melalui musyawarah, sedangkan 95 kasus lainnya digusur secara sepihak. Sehingga eksekusi penggusuran dapat dikatakan paksa kerap dilakukan dengan ancaman alat berat, juga tindakan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 1

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 20

⁵⁰ *Ibid*.

penertiban yang dilakukan oleh personil gabungan mulai dari personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), personil TNI, dan personil POLRI.⁵¹ Dimana penggunaan aparat TNI dan POLRI tersebut tidak berwenang untuk melakukan pengusuran, tetapi tetap melaksanakan pengusuran. Keterlibatan kedua aparat tersebut tidak dapat dapat dibenarkan karena tidak termasuk ke dalam tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Adapun kategorisasi beberapa solusi yang lazim ditawarkan oleh para pihak yang melakukan pengusuran paksa, antara lain relokasi ke tempat baru, ganti rugi materi, ataupun tanpa solusi sama sekali.⁵² Namun apabila merujuk kembali pada standar HAM, setiap korban pengusuran paksa berhak atas rehabilitas, baik dalam bentuk penyediaan tempat tinggal dengan kualitas hidup dalam derajat yang sama (atau lebih baik) dibandingkan tempat tinggal sebelumnya., ataupun bahkan ganti rugi.⁵³ Meski warga mendapatkan relokasi ataupun ganti rugi, bentuk rehabilitas tersebut pada kenyataannya masih banyak yang mendapatkan tidak layak atau tidak sesuai dengan nilai kerugian yang benar-benar dialami oleh warga terdampak.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah alasan terbanyak pengusuran di negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia. Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kota dan masyarakat yang hidup di dalamnya itu pun ternyata belum tentu memberikan dampak positif. Dimana masih banyak masyarakat yang mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan

⁵¹ *Ibid*, hlm 21

⁵² *Ibid*, hlm 23

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 23

nilai kerugian yang benar-benar di alami oleh warga terdampak. Berikut skema mengenai penggusuran lahan yang sering terjadi di Indonesia:

Skema I.4

Fenomena Penggusuran Lahan Milik Negara



(Sumber: Analisis Penulis, 2020)

1.5.4 Pola Eskalasi Konflik Menurut Simon Fisher

Masyarakat tidak ada tanpa konflik dan konsensus, berkaitan dengan hal itu keduanya merupakan prasyarat satu sama lain.⁵⁵ Oleh karena itu tidak akan ada konflik jika tidak ada konsesus yang mendahuluinya. Begitu pun sebaliknya, konflik dapat menyebabkan konsesus dan integrasi. Menurut Ralf Dahrendorf konflik yang ada berhubungan dengan otoritas yang selalu menyirat pada pihak superordinasi maupun subordinasi.⁵⁶

Pihak-pihak yang memegang posisi otoritas dan subordinasi tersebut menurut Ralf Dahrendorf pun mempertahankan kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dari segi substansi dan arah.⁵⁷ Kepentingan-kepentingan ini ada yang bersifat laten maupun nyata. Sehingga menurut Ralf Dahrendorf konflik kepentingan ini tidak harus disadari agar superordinat dan subordinat bertindak. Meskipun demikian ada

⁵⁵ George Ritzer, *Op.Cit*, hlm.451

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 452

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 453

pendekatan lain yang relevansi mengenai konflik laten dan manifest yang lebih relevan dari Simon Fisher.

Simon Fisher menjelaskan konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak dapat dihindarkan dan sering bersifat kreatif.⁵⁸ Seperti ilmuwan sosiolog yang mengatakan bahwa konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Fisher pun menjelaskan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan seperti manusia – sosial, ekonomi, dan kekuasaan.⁵⁹ Contoh ketidakseimbangan tersebut ialah adanya kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian besar menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan.

Simon Fisher mengatakan jika konflik selalu ada, maka konflik itu memang sebenarnya dibutuhkan. Di mana jelas menurut pandangan penulis dalam penelitian ini konflik bukan hanya bersifat negatif namun juga bersifat positif. Ada banyak manfaat konflik, diantaranya yaitu membuat masyarakat menyadari adanya banyak masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis, dan menimbulkan kesenangan.⁶⁰ Oleh karena itu Menurut Fisher pun jika tidak ada konflik, maka banyak orang yang akan menjadi kerdil karena kekurangan stimulasi, berbagai kelompok atau organisasi akan mandek dan mati, masyarakat akan runtuh karena beban mereka sendiri yang tidak mampu beradaptasi dengan

⁵⁸ Simon Fisher, *Op.Cit*, hlm.4

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 4

berbagai keadaan yang berubah dan juga perubahan hubungan kekuasaan yang terjadi.⁶¹

Terdapat tipe-tipe konflik masing-masing memiliki potensi dan tantangannya sendiri.⁶² *Pertama* tanpa konflik, setiap masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif. *Kedua* konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. *Ketiga* konflik terbuka, berakar yang sangat dalam dan nyata, serta memerlukan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. *Keempat* konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar, dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Menurut Simon Fisher, konflik dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda. Di mana kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.⁶³ Konflik berubah menjadi kekerasan jika (1) saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai; (2) suara-suara ketidaksepakaaan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi; (3) banyak ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas.

Trauma dan kepedihan yang dialami di masa lampau, sering diremehkan seperti pengalaman pribadi dan pengalaman kolektif tentang kepedihan, kehilangan, kesakitan, dan mungkin kekerasan. Hal ini sering menjadi penghalang dalam menangani konflik. Memang semua orang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, hlm. 6

⁶³ *Ibid*, hlm. 6

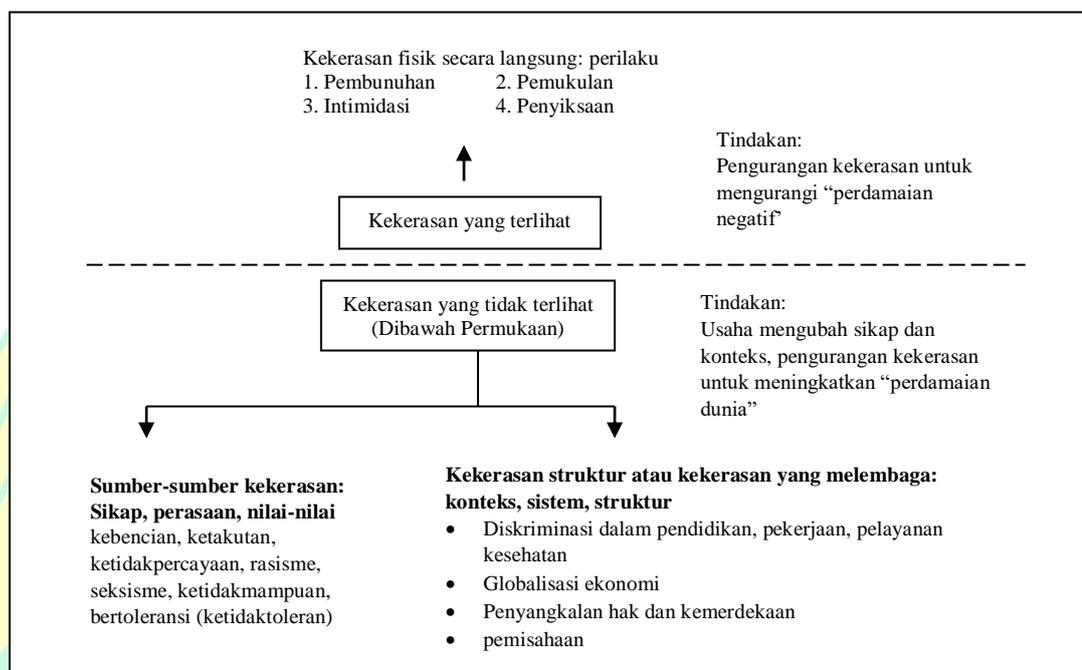
mengalaminya, tetapi peperangan dan penghancuran golongan tertentu menimbulkan dampak yang sangat merusak dan berakibat jangka panjang. Luka-luka ini dapat terus berlanjut disadari atau tidaknya dan membuat masyarakat tidak stabil.

Jika luka-luka tersebut tidak diakui dan diatasi, maka efek paling sederhana yang masyarakat alami akibat luka ini adalah terhalangnya kreativitas untuk berpikir, untuk menjalin hubungan dan bertindak, serta yang lebih drastis lagi adalah luka ini dapat muncul dalam bentuk perilaku yang jahat terhadap masyarakat lain dan bisa dijadikan legitimasi untuk memusnahkan lawan.⁶⁴ Adanya berbagai rintangan tersebut, menciptakan keadaan di mana orang terpaksa menggunakan kekerasan. Budaya kekerasan muncul dan berkembang, karena konflik selalu ditangani melalui kekerasan.

Dewasa ini pemahaman kita tentang kekerasan sudah bertambah, bahkan mencakup bentuk-bentuk kekerasan yang kurang nyata tetapi juga dapat merusak dan bahkan mungkin lebih sulit diatasi. Ada saja sistem yang mendiskriminasi kelompok, masyarakat, dan negara satu dengan lainnya sampai akhirnya mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Hal tersebutlah yang akan menyebabkan kekerasan struktural atau kekerasan yang melembaga. Berikut tabel pemahaman bentuk-bentuk kekerasan yang kurang nyata :

⁶⁴ *Ibid.*

Tabel I.1
Sikap, perilaku, dan konteks



(Sumber: Simon Fisher, Mengelola Konflik)⁶⁵

Tabel I.1 menjelaskan bahwa ada lapisan lain yang lebih mendalam untuk memahami kekerasan. Hal ini berkaitan dengan proses-proses mental yang lebih sulit dilihat: perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.⁶⁶ Semua proses ini memang bukan kekerasan tetapi dengan mudah dapat menjadi sumber kekerasan, atau setidaknya membiarkan perilaku kekerasan dan kekerasan struktural terus berlangsung. Perasaan-perasaan ini dapat membuat kelompok tertentu dalam masyarakat menjadi tidak toleran terhadap siapa saja yang berbeda. Mudah sekali bagi mereka untuk menganggap anggota masyarakat lain sebagai lebih rendah daripada dirinya, sehingga secara langsung atau tidak mereka bertindak tidak manusiawi terhadap orang lain dalam kelompok yang berbeda.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 10

⁶⁶ *Ibid*.

Tabel I.1 menyatakan ketiga elemen (sikap, perilaku, dan konteks) penting diperhatikan bahwa tindakan yang ditujukan untuk mengurangi perilaku kekerasan perlu dilengkapi dengan tindakan-tindakan langsung yang juga menyentuh konteks dan perilaku, jika perdamaian yang nyata atau positif ingin dicapai. Perdamaian yang negatif yaitu tidak adanya perilaku kekerasan, tidak akan berlandaskan terus jika dimensi-dimensi lain tidak diatasi. Tindakan yang menyentuh ketiga dimensi itu dibutuhkan untuk meningkatkan perdamaian yang positif.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekerasan sangat membantu, di mana hal tersebut karena (1) menunjukkan bahwa perilaku kekerasan dan peperangan dalam banyak kasus hanya bagian terkecil dari penyebab suatu konflik; (2) menunjukkan saling keterkaitan antara ketiga dimensi, intervensi pada satu dimensi saja akan menimbulkan dampak reaksi terhadap dimensi lain; (3) menyadarkan untuk mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kekerasan dan memperoleh keuntungan darinya, kadang dikenal sebagai 'para wiswastawan konflik' yang kepentingannya terpenuhi melalui kekerasan yang terus berlangsung; (4) sebagai jalan pembuka yang vital ke arah transformasi konflik dalam hal konteks dan sikap terhadap suatu situasi.⁶⁷

Banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menyelesaikann konflik. Adapun istilah-istilah yang Simon Fisher berikan untuk menunjukan berbagai pendekatan untuk menangani konflik, yang dipandang juga sebagai tahapan dalam suatu proses. Salah satu istilah yang Simon Fisher berikan yaitu **Pengelolaan konflik**. Pengelolaan konflik tersebut bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 10

Adapun Penjelasan Simon Fisher mengenai alat bantu analisis konflik. Simon Fisher menjelaskan bahwa alat bantu analisis konflik sebagai suatu proses praktik untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Analisis konflik terdapat lima tahap secara berurutan dan mungkin berulang dalam siklus yang sama.⁶⁸ *Pertama* prakonflik, periode ini terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik.⁶⁹ Konflik ini bersifat tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi, namun adanya keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

Kedua konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka.⁷⁰ Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya seperti pertikaian atau kekerasan. *Ketiga* krisis, pada tahap ini merupakan puncak konflik, dimana ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat.⁷¹ Dalam konflik skala besar, pada tahap ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh.

Keempat akibat, suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Adanya satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain; atau mungkin satu pihak lainnya menyerah atas desakan pihak lain; atau bahkan kedua pihak setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. Apa pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.19

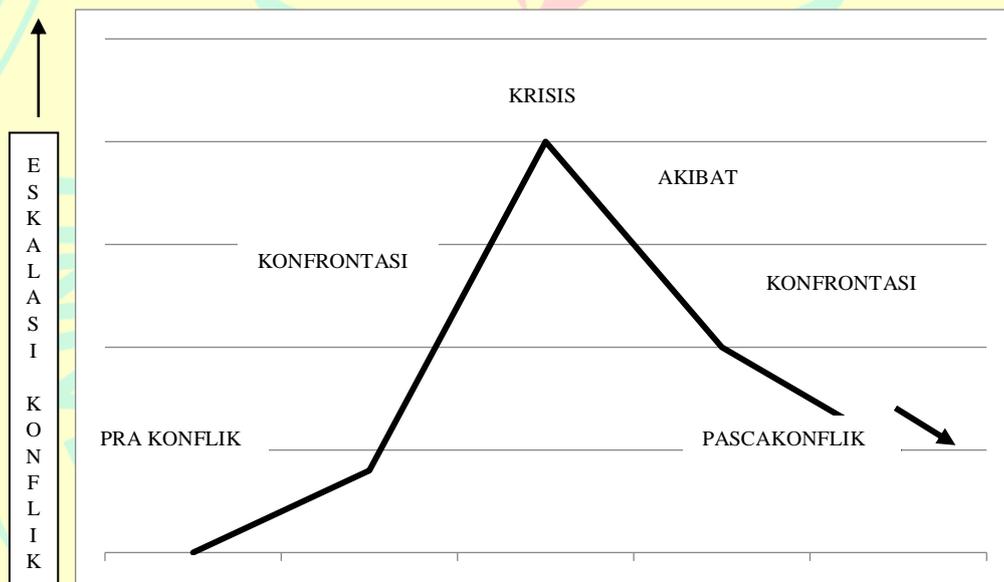
⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Ibid*.

Kelima pascakonflik, tahap ini adalah tahap akhir. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentang tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik. Berikut ini merupakan tahap – tahap konflik yang terjadi selama periode waktu tertentu :

Gambar I.1
Tahap-tahap konflik



(Sumber: Simon fisher, Mengelola Konflik)⁷²

⁷² *Ibid*, hlm. 20

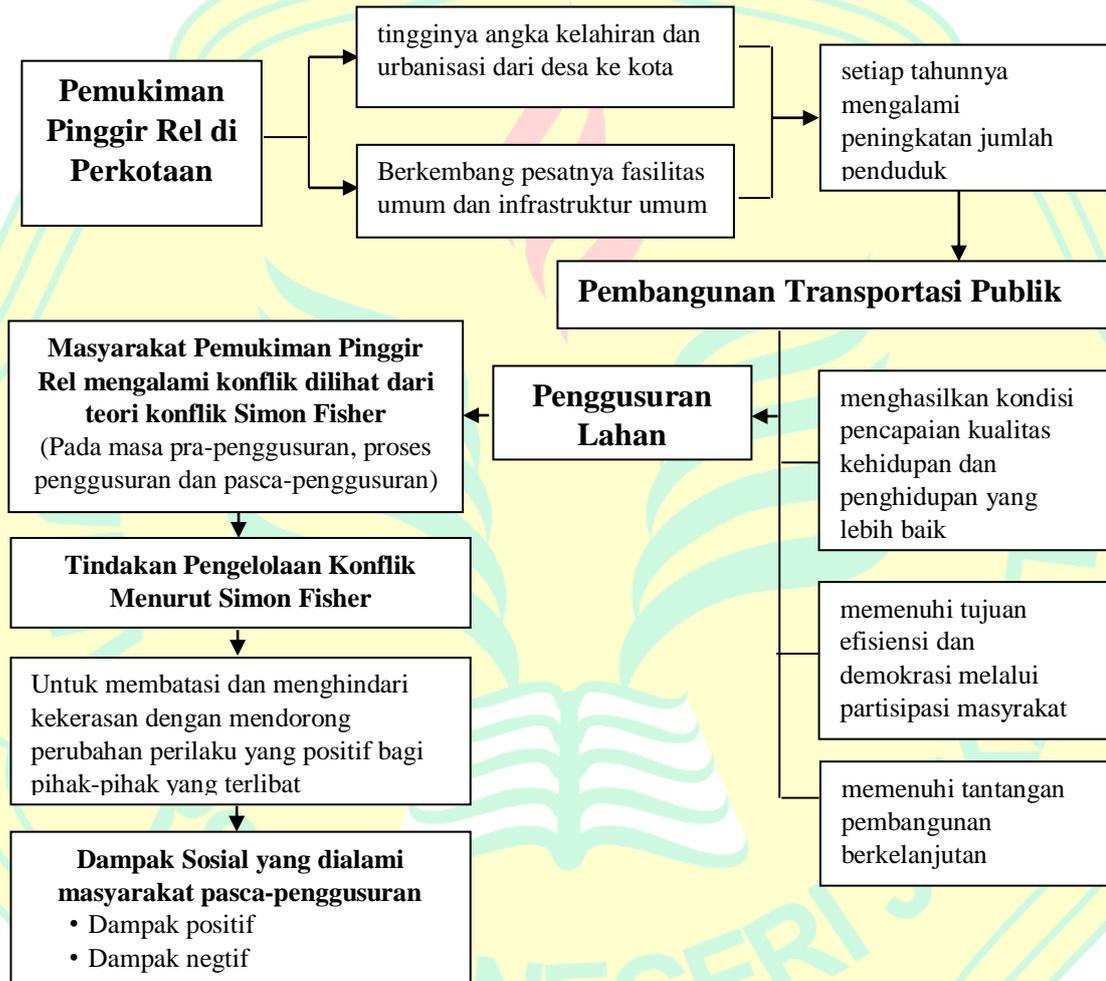
Berdasarkan gambar I.1, dapat disimpulkan kondisi tersebut menjelaskan bahwa tidak semua keadaan suatu daerah relatif damai, adapun beberapa daerah atau bahkan negara yang mungkin berada dalam situasi konflik kekerasan, perang, dan sangat tidak aman. Sehingga tahapan ini perlu digunakan untuk dapat menunjukkan peningkatan atau eskalasi konflik. Adapun pengelolaan konflik menurut Simon Fisher yang dapat dilakukan secara langsung agar pola eskalasi tersebut tidak terjadi. Pengelolaan konflik tersebut antara lain (1) persiapan intervensi; (2) meningkatkan kesadaran dan mobilisasi untuk mendukung perubahan; (3) pencegahan; (4) mempertahankan kehadiran; dan (5) memungkinkan suatu penyelesaian.⁷³

⁷³ *Ibid*, hlm. 95

1.5.5 Hubungan Antar Konsep

Skema I.5

Pola Konflik Laten Penggusuran Lahan Pemukiman



(Sumber: Analisis Penulis, 2020)

Berdasarkan skema I.5 pada halaman sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa adanya pemukiman pinggir rel di perkotaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan urbanisasi dari desa ke kota. Di mana berkembang pesatnya fasilitas umum dan infrastruktur umum di perkotaan menjadi alasan masyarakat desa mudah untuk pindah ke kota. Sehingga mengadun nasib di perkotaan adalah hal yang lumrah bagi masyarakat desa.

Berkembang pesatnya fasilitas umum tersebut pun karena adanya pembangunan transportasi publik yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan dan untuk menghasilkan kondisi pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Seperti halnya pembangunan transportasi publik pada kegiatan pengusuran yang sedang direncanakan di pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III Empang Kota Bogor guna proyek *double track* kereta api Bogor-Sukabumi. Sejak tahun 2018 akhir, pembangun transportasi publik ini telah digalakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah setempat. Namun tidak semudah membalikkan tangan ketika mendengar kabar rumahnya terkena gusur, sampai saat ini masyarakat yang terdampak masih menempati pemukiman tersebut.

Berawal dari pra pengusuran, menurut Simon Fisher konflik pun tentu terjadi, di mana masyarakat berkonflik dengan perasaan (konflik laten) terhadap keadaan yang tidak tahu mau dibawa ke mana dengan kondisi ekonomi yang serba kecukupan. Perlunya tindakan keadilan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik yang keras dan terbuka; serta meminimalisir dampak sosial yang berarti negatif. Dampak sosial negatif tersebut diantaranya sulitnya mencari rumah baru dengan kondisi perekonomian yang cukup; kehilangan pekerjaan; menurunnya keterikatan sosial yang disebabkan sulitnya beradaptasi di lingkungan baru; menurunnya keterikatan keluarga; menjadi tunawisma; serta stress ringan

akibat kesedihan yang mendalam mengenai perubahan cara hidup (*disruption of way of life*). Walaupun demikian terdapat dampak positif yang dialami masyarakat yang terkena dampaknya yaitu tidak mengalami kebisingan apabila masyarakat tersebut pindah ke tempat yang jauh dari rel kereta api; dan memiliki tanah serta bangunan milik sendiri karena menimbulkan perasaan lebih bekerja keras dalam mencari pendatapan agar tidak mengalami kejadian untuk kedua kalinya yaitu dalam kasus penggusuran pemukiman di atas lahan milik negar.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dimana metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁷⁴ Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami potensi konflik yang terjadi pada masyarakat, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukannya pola-pola yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk studi kasus, yaitu penelitian yang menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses ataupun sekelompok individu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan mendeskripsikan secara cermat tentang fenomena pra-penggusuran hingga pasca-penggusuran dari

⁷⁴ John W Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.4

konflik yang terjadi; kemudian pola eskalasi konflik yang terbangun diantara masyarakat dengan instansi pemerintah yang mewakili PT KAI selaku penyelenggara; serta pengelolaan konflik yang dilakukan oleh PT KAI dalam mencegah konflik laten menjadi kekerasan yang dialami masyarakat yang terdampak penggusuran di pemukiman Raden Saleh Layungsari III Empang, Kota Bogor.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber atau informan yang nantinya akan memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian fokus informan dalam penelitian ini menetapkan satu orang informan kunci sebagai kepala lurah yang mengetahui sejarah terbangunnya pemukiman Layungsari dan hubungan antara instansi pemerintah dan perusahaan PT KA dengan masyarakat. Kemudian satu kepala RT yang terdampak rencana penggusuran, serta tiga warga yang terdampak rencana penggusuran baik yang mendirikan bangunan untuk tempat tinggal maupun hanya untuk kegiatan ekonomi seperti berjualan di lokasi tersebut.

Fokus penelitian ini terdapat pada warga yang terencana tergusur, untuk menjelaskan tentang kehidupan mereka di masa pra-penggusuran hingga pasca-penggusuran. Melalui informasi yang diberikan oleh mereka dan pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian, peneliti mampu mengetahui apa saja yang terjadi pada saat pra-penggusuran hingga pasca-penggusuran. Para warga tergusur memiliki konflik laten dari masa pra-penggusuran hingga pasca-penggusuran. Kehidupan mereka sejak masa pra-penggusuran telah memiliki keresahan dan keluhan yang terbentuk

karena kekhawatiran untuk meninggalkan tempat tinggal mereka yang telah berdiri sejak sepuluh tahun lamanya.

Tabel I.2

Karakteristik Subjek Penelitian

Posisi Subjek Penelitian	Nama Informan	Usia	Cakupan Isi Data
4 Masyarakat yang terdampak	<ul style="list-style-type: none"> • Nuril Sugiharti • Bapak Ahmad Sobari (Obay) • Bapak Ayi • Ibu Saibun • Ibu Ade • Ibu Wida 	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Tahun • 48 Tahun • 47 Tahun • 42 Tahun • 37 Tahun • 34 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah tempat tinggal dan membandingkan kondisi saat ini dengan tempo dulu • Alasan menetap di daerah tersebut • Pengetahuan tentang sosialisasi pembebasan lahan untuk proyek <i>double track</i> • Pemahaman tentang proyek <i>double track</i> • Konflik yang dialami masyarakat • Hubungan antar warga • Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah • Hubungan antara masyarakat dengan perusahaan PT KA • Upaya masyarakat dalam pencegahan konflik ke arah kekerasan • Dampak sosial yang dirasakan • Harapan masyarakat
3 Tokoh Aparat Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Eko (Selaku Ketua RT) • Bapak Adi 	<ul style="list-style-type: none"> • 36 Tahun • 32 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah tempat tinggal dan membandingkan kondisi saat ini dengan tempo dulu

	<p>(Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kelurahan Empang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Hery (Ketua Kelurahan Empang) 	<ul style="list-style-type: none"> • 34 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan menetap di daerah tersebut • Data kependudukan RT 04 RW 16 yang terkena dampak pembebasan lahan • Peran RT dalam pembebasan lahan • Keluhan warga yang terdampak • Pemahaman tentang <i>double track</i> • Pemahaman tentang sosialisasi <i>double track</i> • Pemahaman uang ganti rugi sebagai uang kerohiman • Konflik yang dialami masyarakat yang terdampak • Hubungan antar warga baik yang terdampak dengan warga yang tidak terdampak • Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah • Hubungan antara masyarakat dengan perusahaan PT KA • Upaya dalam pencegahan konflik ke arah kekerasan • Dampak sosial yang dirasakan
<p>1 Tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Lucky (Kepala LPM Kelurahan Empang) 	<ul style="list-style-type: none"> • 53 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar warga baik warga yang terdampak dengan warga yang tidak terdampak • Pemahaman proyek <i>double track</i> • Pemahaman sosialisasi pembebasan lahan

			proyek <i>double track</i> <ul style="list-style-type: none"> • Konflik yang dialami masyarakat yang terdampak • Keluhan masyarakat yang terdampak • Program LPM untuk masyarakat yang terdampak • Upaya dalam pencegahan konflik dalam pembebasan lahan • Dampak sosial yang terus dikeluhkan masyarakat yang terdampak
--	--	--	---

(Sumber: Analisis Penulis, 2020)

1.6.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pemukiman Gang Raden Saleh RT 04 RW 16 Jalan Layungsari III Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Pemukiman ini terletak di pinggir rel kereta api jalur Sukabumi-Bogor. Lokasi ini selain terletak di pinggir rel, lokasi ini memang strategis, karena lokasi yang dekat dengan jalan raya dan dilewati angkutan umum, dekat pula dengan kantor administrasi kecamatan, kantor polisi, lembaga pendidikan seperti SD Layungsari, SMP, dan SMA. Lokasi pun selalu ramai baik oleh penglaju dan pedagang. Waktu penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020 pada masa pandemi Covid-19.

1.6.4 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu menciptakan atmosfer kekeluargaan dan hubungan kedekatan yang baik dengan para informan

yang akan diteliti tersebut. peneliti pun akan mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai fenomena yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan, sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan lebih mendalam mengenai kegiatan apa yang sedang terjadi pada pemukiman yang akan digusur.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.6.5.1 Observasi

Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian, maka peneliti menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data melalui pengamatan oleh panca indera agar dapat melihat secara langsung fenomena yang sedang terjadi pada pemukiman yang akan digusur. Observasi yang dilakukan pertama adalah melakukan pengamatan terhadap pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III dan mengelilingi pemukiman untuk melihat kondisi pemukiman, letak geografis, dan kondisi lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak sosial yang terjadi pada pra-penggusuran. Pengamatan selanjutnya adalah pengamatan terhadap masyarakatnya dengan cara berinteraksi dengan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pola eskalasi konflik yang terjadi pada masyarakat di pemukiman Raden Saleh Jalan Layungsari III dalam pra-penggusuran pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi.

1.6.5.2 Wawancara

Teknik wawancara mendalam, dimana peneliti memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada informan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan kekeluargaan dan hubungan kedekatan yang baik dengan informan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dari informan secara lebih mendetail. Wawancara dilakukan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

1.6.5.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Dokumentasi merupakan kumpulan dokumen yang berisi catatan, foto, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Hasil dari dokumentasi dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan secara jelas peristiwa yang berusaha dibahas oleh peneliti dalam penelitian.

1.6.6 Triangulasi Data

Keabsahan suatu penelitian dapat dicek atau validitas data menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Teknik triangulasi sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana yang merupakan upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain.

Pada proses analisis data, dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah:

- Perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

- Perbandingan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi
- Perbandingan keadaan dan persektif seseorang berpendapat sebagai rakyat biasa, dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

Peneliti pun mewawancarai Aparatur Pemerintah Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor mengenai kebijakan dalam melakukan pembebasan lahan pada pemukiman yang terdampak; uang ganti rugi yang diberikan kepada warga; serta peran pemerintah daerah dalam proses pembebasan lahan dari pra-penggusuran hingga pasca-penggusuran mewakili PT KAI selaku penyelenggara pembangunan proyek jalur ganda KA Bogor – Sukabumi.

1.7 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian kali ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami. Keterbatasan dalam penelitian yang tidak dapat kita pungkiri saat ini yaitu kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Adanya virus COVID – 19 yang membuat ruang lingkup mencari data bagi peneliti sempit. Akibat dari COVID – 19 tersebut, adanya penolakan dari beberapa informan karena tidak menerima tamu sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID – 19, sehingga jumlah informan hanya 10 orang.

Selain itu dalam pengajuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak PTKAI dan DJKA Jawa Barat harus memenuhi prosedur seperti melakukan Rapid Test terlebih dahulu; serta jarak peneliti dengan kantor

DJKA Jawa Barat yang ada di Bandung tidak memungkinkan untuk peneliti datangkan. Sehingga peneliti menggunakan metode *online form* yang difasilitasi oleh pihak DJKA melalui website resminya yaitu ppid.dephub.go.id, djka.dephub.go.id dan salah satu akun media sosial resminya Kemenhub RI dengan nama pengguna @kemenhub151 dalam mendapatkan data mengenai pembangunan jalur ganda KA Bogor Sukabumi. Selain itu peneliti terus mencari informasi terkait pembangunan jalur ganda khususnya proyek KA Bogor - Sukabumi dalam website setkab.go.id, Kompas.com, dan m.liputan6.com dalam mengutip penjelasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jalur rel ganda lintas Bogor Sukabumi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab; satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, satu bab analisis, dan satu bab kesimpulan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pada bab pertama ini peneliti menjabarkan latar belakang yang membawa peneliti akan ketertarikan untuk meneliti mengenai fenomena pengrusakan yang terjadi di wilayah Kota Bogor, khususnya di pemukiman Layungsari III Empang, Bogor Selatan. Peneliti pun tertarik melihat bagaimana dampak dari pengrusakan tersebut dari segi sosial dan ekonomi, serta bagaimana pola eskalasi konflik yang terjadi pada pengrusakan pemukiman Raden Saleh di Jalan Layungsari III. Selanjutnya dari latar belakang tersebut ditarik permasalahan utama penelitian dengan dijabarkan tiga pokok perumusan permasalahan. Adanya permasalahan tersebut, peneliti menjabarkan tujuan dan manfaat penelitian yang dijalankan bagi peneliti dan masyarakat luas. Bab ini juga menjabarkan tinjauan pustaka sejenis, yaitu penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai bahan masukan dan menjadi bahan referensi dalam penelitian ini. Sedangkan untuk menginterpretasikan

secara sosiologis fenomena yang diteliti, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai analisis sementara. Setelah semuanya dapat dijabarkan, peneliti merumuskan metode penelitian yang terdiri dari subjek peneliti, peran peneliti, lokasi dan waktu penelitian serta teknik pengumpulan data. Peneliti pun melakukan triangulasi data sebagai metode validasi data agar data yang peneliti peroleh dapat dijamin validitasnya dan juga menjabarkan keterbatasan penelitian. Sub bab terakhir dari pendahuluan yaitu sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab kedua, peneliti melakukan kajian awal dalam memperoleh gambaran mengenai deskripsi konteks sosial pemukiman pinggir rel kereta api jalur Bogor-Sukabumi di Layungsari III khususnya pada Wilayah Raden Saleh Jalan Layungsari III Kelurahan empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Pada bagian ini dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu gambaran umum pemukiman Layungsari III; sejarah kemunculan pemukiman Raden Saleh di Jalan Layungsari III; serta sejarah kemunculan rel kereta api PT KA Bogor – Sukabumi. Setelah sejarah telah dijelaskan, peneliti memberikan peta wilayah pembebasan lahan pada proyek jalur ganda di Kelurahan Empang. Pada sub terakhir bab ini pun peneliti mendeskripsikan mengenai pihak-pihak yang berkonflik dalam pembebasan lahan atas pembangunan jalur ganda KA Bogor - Sukabumi.

BAB III : Pada bab ketiga, peneliti memaparkan hasil temuan penelitian dengan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang sesuai kriteria penelitian. Pada bagian ini dibagi kedalam beberapa sub bab, yaitu masyarakat pemukiman Raden Saleh Layungsari III di area proyek pembangunan jalur ganda KA Bogor – Sukabumi sebelum pengurusan; pembangunan jalur ganda KA Bogor – Sukabumi; upaya PT KAI dalam proses pembebasan lahan proyek jalur ganda KA Bogor – Sukabumi; serta respon masyarakat terhadap pengurusan yang telah diselenggarakan. Oleh karena itu di Bab III ini diharap penulis mampu

menjelaskan kehidupan warga terdusur yang fokus pada informan peneliti. Mulai dari pengalaman mereka memukim di Raden Saleh, menetap dan membangun usaha, memiliki hubungan dan tatanan sosial yang baik, sampai pada kasus penggusuran itu mulai terdengar di telinga mereka hingga mereka mengalami penggusuran tersebut dan merasakan dampaknya.

BAB IV : pada bab ini penulis akan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori dan konsep yang berkaitan. Peneliti akan menggunakan teori konflik untuk menganalisis pola eskalasi konflik yang terjadi di masyarakat dalam konflik yang mereka rasakan terhadap rencana penggusuran tersebut. Terdapat beberapa sub bab diantaranya mengenai pola konflik laten yang terjadi pada masyarakat pemukiman Raden Saleh dari mulai pra-penggusuran, proses penggusuran, hingga pasca-penggusuran. Kemudian penulis akan memnjelaskan mengenai pengelolaan konflik laten dengan upaya pencegahan konflik menurut Simon Fisher yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik terbuka (*manifest*) dan memicu kekerasan. Terakhir, pada sub bab ini akan menjelaskan dampak sosial yang akan terjadi dari hasil temuan peneliti pada dinamika pra-penggusuran di pemukiman Raden Saleh di Jalan Layungsari III Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

BAB V : Pada bab kelima ini, bab yang menjadi penutup skripsi ini. dimana di dalamnya berisikan kesimpulan, rekomendasi, gambaran umum, dan jawaban tentative atas permasalahan penelitian skripsi ini.